

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut menyediakan sebagian besar populasi global dengan makanan dan mata pencaharian dan merupakan sarana transportasi untuk 80% perdagangan global. Lautan menutupi 72% permukaan planet biru kita dan membentuk lebih dari 95% biosfer. Kehidupan berasal dari lautan dan mereka terus mendukung semua kehidupan dengan menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, mendaur ulang nutrisi, dan mengatur iklim dan suhu global (Plan Bleu, 2020). Besarnya potensi laut yang dimiliki sebagian negara di dunia, mendorong dibentuknya suatu konsep dan implementasi pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi laut melalui *Blue Economy*. Konsep *Blue Economy* kemudian menjadi alternatif bagi negara dengan teritorial perairan yang luas dan minim implementasi *Green Economy* (Smith-Godfrey, 2016).

Untuk mewujudkan implementasi *Blue Economy*, sektor perikanan dan akuakultur berperan secara signifikan dengan menyumbangkan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan dan gizi, serta menjadi lahan pekerjaan bagi ratusan juta jiwa manusia di seluruh dunia (FAO, 2021). Ikan menyumbang lebih dari 16% protein hewani yang dikonsumsi oleh populasi dunia dan 6,5% dari semua protein yang dikonsumsi, dengan 1 miliar orang mengandalkan sumber protein ini. Ikan juga merupakan sumber nutrisi yang sangat penting. Bahkan dalam jumlah kecil, penyediaan ikan dapat efektif dalam mengatasi ketahanan pangan dan gizi di antara populasi miskin dan rentan di seluruh dunia (World Bank, 2016).

Pada tahun 2019, tujuh negara nelayan teratas menyumbang hampir setengah dari total produksi perikanan tangkap. Cina adalah negara penangkap ikan dengan peringkat teratas, menyumbang 15,1 persen dari total produksi tangkapan, diikuti oleh Indonesia (8,1 persen), India (5,9 persen), Federasi Rusia (5,4 persen), Peru (5,2 persen), Amerika Serikat Amerika (5,2 persen), dan Vietnam (3,7 persen) Berdasarkan data Food and Agricultural Organization (FAO) pada publikasi yang berjudul *Impacts of Climate Change on Fisheries and Aquaculture*, Indonesia menjadi negara kedua dalam menyumbangkan produksi pangan laut terbesar setelah Cina. Bahkan pada bidang Perikanan budidaya, Cina, India dan Indonesia menjadi penyumbang terbesar yang secara akumulatif terhitung 75% dari keseluruhan produksi akuakultur global pada tahun 2016 silam (FAO, 2021).

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah kepulauan terbesar di dunia, memiliki 2/3 wilayah lautan. Memiliki garis pantai yang membentang sejauh 108.000 kilometer dengan total wilayah perairan sebesar 6.400.00 km² (PUSDATIN-KKP, 2018). Ekonomi kelautan negeri telah mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat selama lima tahun terakhir, memberikan kontribusi sekitar USD 256 miliar dalam nilai tambah bruto (GVA) tahunan pada tahun 2013 naik dari USD 73 miliar pada tahun 2008 (Ebarvia, 2016). Industri komoditas kelautan Indonesia secara langsung melibatkan 2,8 juta rumah tangga. Hal tersebut mendukung bahwasannya, 54 persen protein hewani Indonesia berasal dari ikan dan pangan laut lainnya seperti udang, kerang, rumput laut dan lain sebagainya. Sepuluh persen komoditas kelautan dunia dipasok oleh Indonesia dan jumlahnya akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya permintaan akan makanan laut di seluruh dunia (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020).

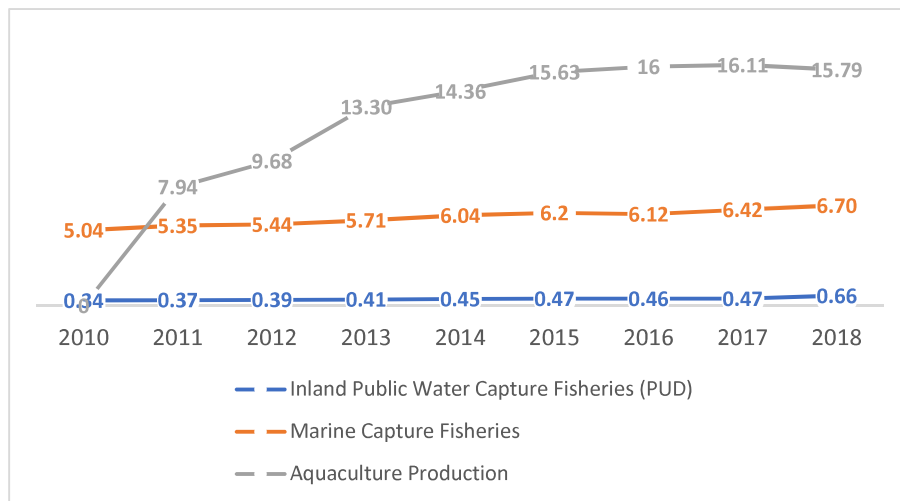
**Tabel 1.1 Pertumbuhan Produksi Perikanan Indonesia
Tahun 2015-2019 (US\$ Miliar)**

Pertumbuhan Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2015- 2019 (US\$ miliar)			
Tahun	Ekspor	Total Produksi Perikanan	Pertumbuhan Sektor Perikanan
2015	3.9	12.2	7.8%
2016	4.2	11.9	5.1%
2017	4.5	12.4	6.7%
2018	5.0	17.6	11%
2019	5.5	25.32	12%

(Sumber: The Packard Foundation)

Kontribusinya terhadap PDB diperkirakan mencapai 2,8% saja, kontribusi tersebut lebih besar dibandingkan dengan sektor perikanan negara regional lainnya seperti China, Filipina, Malaysia dan Thailand. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1, sektor perikanan berkontribusi pada pendapatan ekspor senilai sekitar US\$4,1 miliar pada tahun 2017, Bank Dunia mencatat bahwa perbaikan pengelolaan perikanan Indonesia akan menambah nilai hingga US\$3,3 miliar per tahun dalam waktu 10 tahun (Thomas, 2019). Ekspansi ekonomi kelautan Indonesia telah berkontribusi pada dinamisme ekonomi negara yang kuat yang tercatat sejak setelah krisis keuangan Asia 1997, yang menjadikan Indonesia menduduki sebagai negara dengan ekonomi kelautan terbesar di Asia Tenggara dan menjadi negara yang berproduksi menengah ke atas sejak 2019 (OECD, 2021).

Akan tetapi, pengelolaan perikanan yang buruk menyebabkan hampir 40 persen tangkapan makanan laut Indonesia, atau mencapai US\$7,28 miliar per tahun, hal ini diklasifikasikan sebagai limbah atau kerugian. Jaringan distribusi yang buruk berkontribusi 15 persen terhadap angka ini, dengan sembilan persen lainnya hilang karena proses pengolahan dan pengemasan yang buruk. Praktik penangkapan ikan yang buruk, seperti membuang tangkapan yang tidak diinginkan ke laut, berpotensi menyumbang 8,2 persen dengan enam persen kerugian lainnya berasal dari transportasi yang buruk dan sistem penyimpanan yang buruk (Thomas, 2019). Dengan sektor perikanan Indonesia memainkan peran penting dalam menyediakan ketahanan pangan dan lapangan kerja, para pemangku kepentingan industri harus mempertimbangkan risiko yang terus-menerus ditimbulkan oleh salah urus terhadap produktivitas jangka panjang dan nilai ekonomi aset perikananannya. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi pada sektor laut dan perikanan yang sangat menakjubkan untuk dimanfaatkan dan dijaga dengan maksimal.



Gambar 1. 1

Produksi Perikanan Tangkap Laut, Perikanan budidaya dan Perikanan Tangkap PUD (juta ton) Tahun 2010-2018

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)

Menurut data yang dipublikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Grafik 1) mencatat bahwa secara nasional produksi perikanan budidaya jauh lebih unggul dibandingkan perikanan tangkap laut atau perikanan tangkap Perairan Umum Darat (PUD). Angka produksi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap mencapai 7,94 juta ton dan meningkatkan secara signifikan setiap tahunnya menjadi 15,79 juta ton pada tahun 2018. Pada produksi perikanan laut juga mengalami kenaikan yang

cukup konstan dimana pada data tahun 2010 sejumlah 5,04 juta ton menjadi 6,70 juta ton (Gambar 1.1). Berdasarkan grafik di atas, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan produksi perikanan Indonesia mengalami kenaikan yang cukup baik yakni sebesar 32,88% dalam periode 2010-2018 pada produksi perikanan tangkap laut, dan pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 98,83%, walaupun pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Maka berdasarkan data di atas, dapat diketahui besarnya potensi laut dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, besarnya potensi laut dan perikanan tersebut berpengaruh terhadap perubahan iklim yang kemudian, seperti kemungkinan di masa depan produksi perikanan dapat menurun. Apabila *over-fishing* terjadi maka hal ini dapat mengganggu iklim, lingkungan dan kehidupan baik biota di laut, hingga rantai dampaknya kepada manusia (Cámara & Santero-Sánchez, 2019). Walaupun *over-fishing* dianggap dapat menyebabkan menurunnya potensi produksi perikanan, namun faktor alam seperti cuaca ekstrem dan kondisi laut yang terus berubah juga tidak dapat dihindari (Badan Pusat Statistik, 2020). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan pembentukan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan WPPNRI menjadi 11 wilayah dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 18/Kepmen-KP/2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan 11 WPPNRI mengacu pada konsep *fishing area* yang ditetapkan oleh FAO. Pembentukan WPPNRI ini dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan dalam UU Perikanan No 31 Tahun 2004 dan Perubahannya UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dibentuknya WPPNRI ini juga bertujuan dalam rangka menjaga stabilitas kehidupan laut, sehingga produksi perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

Besarnya potensi laut dan perikanan di Indonesia tentu dihadapkan dengan risiko dan tantangan yang besar juga. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa potensi perikanan dapat mengalami penurunan apabila terjadi *over-fishing* (Cámara & Santero-Sánchez, 2019; N'Souvi, Sun, Zhang, Broohm, & Okey, 2021). Selain itu, walaupun Indonesia dikenal dengan wilayah lautnya yang sangat luas, namun permasalahan terkait kesejahteraan nelayan yang rendah, masih menjadi masalah utama yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Rendahnya harga ikan di pasar bagi nelayan, menjadi salah satu dampak penurunan jumlah nelayan laut dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia per tahun 2017, terdapat jumlah nelayan laut hanya pada angka 2,24 juta pekerja. Jumlah tersebut sudah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2003, dimana pada

masa itu jumlah nelayan laut mampu mencapai angka 3,31 juta pekerja (PUSDATIN-KKP, 2018). Angka tersebut diperkirakan akan terus menurun jika kesejahteraan ekonomi nelayan tidak dapat terpenuhi.

Tujuan utama *Blue Economy* adalah menciptakan industrialisasi laut yang berkelanjutan untuk kepentingan semua. Makna keberlanjutan dalam *Blue Economy* adalah terbentuknya keseimbangan antara kegiatan ekonomi, perdagangan, legislatif dan peraturan, sistem pendukung (lingkungan ekologis) dan masyarakat yang bergantung padanya (mata pencaharian dan makanan). Keseimbangan ini dapat dihitung dan memiliki kemampuan untuk diterjemahkan ke dalam ukuran efektivitas untuk mencapai keseimbangan (Smith-Godfrey, 2016). Pembangunan berbasis samudra dan transisi menuju *Blue Economy* merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia, adapun beberapa upaya yang dilakukan diantaranya, *pertama*, meningkatkan manajemen dalam sektor perikanan. Tujuan khusus yang selaras dengan prinsip ekonomi biru terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Kelautan 2017, dan berbagai inisiatif yang sedang berlangsung. Terkait hal tersebut sikap tegas yang diambil oleh Pemerintah Indonesia terhadap penangkapan ikan asing ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU). Meskipun kontroversial dalam beberapa hal, upaya ini telah mengurangi tekanan pada stok ikan dari sumber asing, menciptakan peluang jangka pendek untuk membangun kembali perikanan utama (World Bank, 2021).

Kedua, memperluas proteksi wilayah kelautan. Pemerintah Indonesia juga telah membuat kemajuan substansial dalam memperluas kawasan perlindungan laut (KKL) menjadi lebih dari 23 juta hektar (memenuhi target Aichi 7 dari 20 juta hektar), dengan tujuan lebih lanjut untuk mencapai 30 juta hektar pada tahun 2030. Meningkatkan pengelolaan kawasan ini adalah sekarang menjadi prioritas. Untuk memantau kemajuan, KKP telah menerapkan sistem kartu skor (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, E-KKP3K) di seluruh KKP untuk menyediakan sarana pelacakan efektivitas pengelolaan yang ketat dan konsisten, dan baru-baru ini mengembangkan sistem yang ditingkatkan versi dengan peningkatan fokus pada hasil sosial-ekonomi dan lingkungan (World Bank, 2021).

Ketiga, mengembangkan dan mengintegrasikan rencana tata ruang kelautan dan daerah pesisir. Baik pemerintah pusat maupun provinsi bekerja untuk meningkatkan pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui perencanaan tata ruang laut, alat untuk menyelesaikan konflik penggunaan lahan pesisir dan lautan dengan menetapkan zona untuk penggunaan khusus melalui proses partisipatif. Sebagian besar provinsi telah

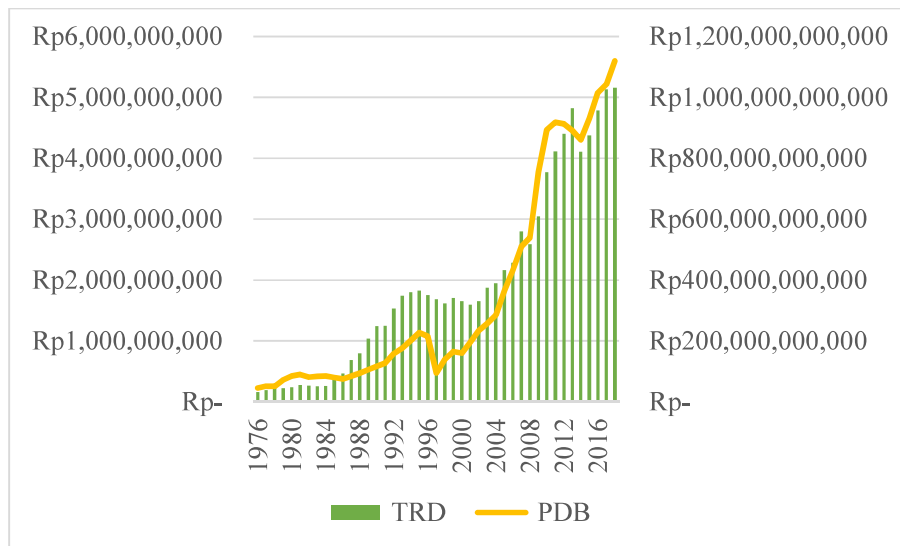
mengembangkan rencana tata ruang laut untuk perairan mereka (Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau Pulau Kecil, RZ-WP3K), dan akan mengintegrasikan rencana ini dengan kerangka perencanaan tata ruang (terestrial dan kelautan) Indonesia yang lebih luas (Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW) di tahun-tahun mendatang (World Bank, 2021).

Dengan demikian, berdasarkan beberapa upaya pemerintah dalam mengimplementasikan *Blue Economy* di atas, maka dapat tercapai dalam pemanfaatan hasil produksi laut dan perikanan, maka diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik bruto (PDB) baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, khususnya dalam sektor produksi pangan laut melalui produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan perdagangan internasional dalam sektor perikanan. Sebagaimana dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa hasil produksi pangan laut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. China contohnya (Hanson et al., 2011) menjadi negara dengan kontribusi paling pada sektor perikanan secara global (FAO, 2021), sektor kelautan dan perikanan tentu berperan penting dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi di China. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hubungan positif antara kegiatan ekspor hasil pangan laut dengan pertumbuhan ekonomi melalui PDB di China (Chai, Hu, & Wei, 2021).

Hubungan positif antara hasil produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi juga dibuktikan dalam penelitian bahwa produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap laut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Meskipun pangsa perikanan dalam PDB Pakistan relatif sangat kecil, pendapatan dari ekspor telah sangat meningkatkan pendapatan nasional. Berdasarkan sensus pemerintah Pakistan pada tahun 2014, 155.671 ton makanan laut diekspor, dan nilainya meningkat 16 persen. Walaupun produksi perikanan dan budidaya memiliki kontribusi kecil terhadap produk domestik bruto mereka dapat meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor. Dengan demikian, sektor kelautan dan perikanan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Pakistan (Rehman, Deyuan, Hena, & Chandio, 2019).

Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, karenanya 17% penduduk India tinggal di daerah pesisir pantai dan hidup bergantung pada hasil produksi lautnya (Sha, 2019). Melalui sektor perikanan dan budidaya laut lapangan pekerjaan dapat dibentuk untuk sekitar 14,5 juta penduduk. Hasil produksi laut yang dihasilkan India juga sangat besar, setelah China dan Indonesia (FAO, 2021), yakni sebesar 11.409,45 ton ikan pada periode 2016-2017. Dengan demikian, besarnya produksi laut yang dihasilkan

menjadi salah satu motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu tersebut,, yakni sebesar 6,3% dari produksi ikan global, sektor ini menyumbang 1,1% dari PDB dan 5,15% dari PDB pertanian (NFDB, 2017). Selain India, Sha (2019) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sektor perikanan di Sri Lanka juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui PDB. Sektor perikanan di Sri Lanka menyumbang sekitar 1,4% dari PDB nasional dan 5,9% dari PDB Provinsi Utara. Walaupun terbilang masih sangat kecil kontribusinya dalam PDB, melalui implementasi *Blue Economy* diharapkan sektor kelautan dan perikanan di Sri Lanka dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 1. 2

**Perbandingan Perdagangan Internasional dalam Sektor Perikanan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 1976-2019)**

(Sumber: World Bank dan OECD)

Pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan peran pada sektor perikanan terutama dalam sektor perdagangan internasional untuk mendorong pendapatan negara. Adapun makanan laut (*seafood*) adalah komoditas pangan dengan nilai tinggi yang diperdagangkan secara internasional di seluruh dunia. Lebih dari separuh perdagangan ikan berasal dari perairan negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia (World Bank, 2021). Sebagai negara dengan wilayah maritim yang sangat luas, Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan laut melalui kegiatan perdagangan internasionalnya. Sebagaimana dalam laporan tahunan World Bank, dijelaskan bahwa perdagangan internasional dalam sektor perikanan merupakan motor penggerak dalam

mendorong perekonomian suatu negara dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, seperti Indonesia (World Bank, 2021).

Alharthi dan Hanif (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perdagangan internasional yang diperoleh dari jumlah ekspor dan impor pada sektor perikanan memiliki hubungan variabel yang signifikan dengan tren positif, terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara anggota South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Di Indonesia sendiri, peran perdagangan internasional khususnya pada bidang ekspor perikanan dinilai memiliki kontribusi yang tinggi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara. Pada grafik 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa grafik perdagangan internasional dalam sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki garis tren yang serupa. Sayangnya, kontribusi sektor perikanan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan potensi kelautan yang dimiliki. Implementasi *Blue Economy* dalam pengelolaan produksi pangan laut Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan laut itu sendiri khususnya pada sektor perikanan budidaya dan perdagangan internasional dalam sektor perikanan untuk mendorong laju perekonomian negara baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, konsep *Blue Economy* harus diterapkan untuk menciptakan perekonomian negara yang semakin maju dengan memanfaatkan potensi kelautannya, tanpa merusak keberlangsungan hidup ekosistem di dalamnya.

Blue Economy nyatanya telah dibahas jauh melalui firman Allah SWT, Al-Qur'an, dan Hadits Rasulullah SAW dan ilmunya dikembangkan ke dalam sebuah konsep bernama *fiqh bi'ah* atau fikih lingkungan. *Fiqh bi'ah* adalah sebuah konsep hukum Islam yang membahas tentang sikap manusia dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga alam dan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai *mashalah* bagi umat manusia yang berlandaskan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW (Hermanto, 2021; Noor, 2018; Yunita & Idami, 2020). Tujuan utama implementasi *fiqh bi'ah* adalah untuk mencegah kerusakan alam dan lingkungan akibat pemanfaatan yang berlebihan oleh manusia. Hal tersebut seiring dengan firman Allah SWT, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30, yang menyatakan bahwa Allah SWT telah memerintahkan manusia selaku *khalifah fil ardh* atau wakil Allah SWT di dunia ini, untuk melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap segala sesuatu, yang ada di muka bumi sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نَسْبِحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ
تَعْلَمُونَ لَا مَا

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”” (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 30)

Sebagaimana dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, dijelaskan tentang ketentuan dalam *fiqih bi'ah* menegaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang berupa air, api dan garam (tanah), juga memelihara alam serta seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan tentang konsep *maqashid syariah* yang dirumuskan dalam *kulliyat al-khams* dalam perspektif lingkungan. *Kulliyat al-khams* sendiri terdiri atas upaya dalam perlindungan agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz an-nashl*), dan melindungi harta atau kekayaan (*hifz al-mal*). Melalui penjagaan dan pemeliharaan lingkungan maka juga akan memenuhi kelima unsur *maqashid syariah* tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian ini yang membahas tentang pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam perspektif sumber daya alam dan lingkungan ekonomi Islam. Dimana peran hasil produksi pangan laut yang berupa ikan, tanaman laut dan mutiara memiliki manfaat dalam kehidupan manusia, khususnya dalam pengadaan makanan sehat karena protein ikan yang tinggi dan dibutuhkan bagi manusia.

Penjelasan di atas sejalan dengan firman Allah SWT dalam kitabnya Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 14 berfirman,

جَلِيَّةٌ مِنْهُ وَتَسْتَخْرِجُوا أَطْرِي لَحْمًا مِنْهُ لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ سَخَّرَ الَّذِي وَهُوَ
تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فُضِّلَهُ مِنْ وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ مَوَاحِرَ الْفُلْكِ وَتَرَى تَلْبَسُونَهَا

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur” (Q.S An-Nahl ayat 14)

Melalui ayat di atas, Allah SWT memberi kabar tentang hasil ciptaannya yang berada di laut dan ombak lautan yang bergemuruh, dan di dalam laut tersebut Allah SWT telah memberikan

anugerah kepada hambaNya dengan menundukkan lautan tersebut agar mereka dapat mengaranginya. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, maksud dari Q.S An-Nahl ayat 14 adalah melalui kuasa Allah SWT dengan menciptakan lautan dan segala isinya, memberikan kenikmatan kepada manusia berupa ikan-ikan besar dan kecil, dan halal hukum untuk memakannya baik yang hidup dan mati. Tidak hanya itu, Allah SWT juga memberikan nikmat lebih berupa diciptakannya mutiara dan permata yang akan keluar darimana dia berasal (kerang) sehingga dapat menjadi perhiasan bagi siapa pun yang memakainya. Selain itu, Allah SWT juga menundukkan lautan yang ganas dan angin laut yang kencang, agar manusia dapat mengarungi dan mendapatkan berkah serta manfaat di dalamnya. Allah SWT juga mengajari manusia menciptakan perahu melalui peristiwa Nabi Nuh, dan menjadikannya sebagai manusia pertama yang mengarungi laut samudera di bumi. Dengan demikian, Allah meminta manusia untuk mencari keuntungan (bekerja) dan bersyukur atas nikmat yang telah disediakanNya (Syaiikh, 2016).

Sebagai seorang *khalifah* Allah SWT, manusia berperan menjadi wakil Allah SWT dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga semua yang dikaruniakanNya di bumi ini dengan sebaik dan seadil mungkin, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan demikian, manusia ditunjukkan menjadi *khalifah fil ardh* juga diperintahkan untuk memanfaatkan, mengelola dan menjaga semua karunia dan nikmat Allah SWT di dalam laut. Pernyataan tersebut sejalan dengan penggunaan variabel produksi perikanan tangkap yang menjelaskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui hasil produksi laut berupa ikan dan usaha manusia dalam melestarikan alam sehingga tidak terjadi *overfishing*. Sedangkan pada variabel produksi perikanan budidaya, pengembangbiakkan ikan dengan menghasilkan benih-benih berkualitas juga dipandang dalam tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 30, manusia dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lebih lanjut, pada variabel ketiga yaitu tentang perdagangan internasional dalam sektor perikanan, telah banyak dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya melalui Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 79, tentang kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS yang menggunakan perahu sebagai alat transportasi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ibnu Katsir (Syaiikh, 2016) menafsirkan bahwa tujuan Nabi Khidir As menenggelamkan perahu tersebut adalah agar tidak dimanfaatkan oleh Raja yang dzalim, melainkan dapat diperbaiki oleh pemilik perahu sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu orang miskin yang tidak punya apa-apa. Apabila perahu tersebut diperbaiki kembali oleh pemiliknya, maka setelahnya

ia dapat mencari keuntungan (pendapatan) kembali. Hal ini juga diperjelas dengan kisah Khalifah Umar ibn Khattab dalam mengelola sektor ekspor dan impor. Dimana kegiatan ekspor dilakukan apabila terdapat kelebihan hasil produksi suatu komoditas tertentu, yang kemudian dijual kepada negara lain. Sedangkan pada kegiatan impor, Khalifah Umar melakukannya apabila komoditas-komoditas tertentu yang dibutuhkan umat, tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah atau komoditas yang tidak dapat diproduksi sendiri. Penetapan *ushr* (bea cukai) dalam kegiatan impor juga membantu pemerintah dalam mengawasi komoditas yang masuk, sehingga tidak merugikan produsen dalam negeri (Nisak, 2021).

Konsep *Blue Economy* yang saat ini mulai digerakkan oleh pemerintah dalam mengelola hasil produksi pangan laut, ternyata mengandung unsur ekonomi Islam salah satunya adalah tentang penjagaan sumber daya alam dan lingkungan laut. Sebagai seorang *khilafah*, manusia diberikan perintah untuk mengelola dan memanfaatkan semua karunia dan nikmat Allah SWT yang telah diberikan di muka bumi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Lebih lanjut, manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan melakukan penjagaan terhadap alam dan lingkungan sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT kepada manusia, di bumi (Sukanto, 2017). Walaupun ruang lingkup *Blue Economy* cukup luas, namun dalam penelitian ini membahas pada sektor perikanan dan perikanan budidaya. Dimana dalam konsep *Blue Economy*, negara dengan potensi laut yang besar maupun kecil didorong untuk meningkatkan pengelolaannya pada sektor perikanan khususnya dalam budidaya ikan (*aquaculture*), baik ikan laut maupun ikan darat (tawar) (Sha, 2019).

Esensi pada konsep *Blue Economy* yaitu bekerja seiring dengan semua hal yang telah disediakan oleh alam secara maksimal, tanpa mengurangi tetapi justru memperkaya entitas di dalamnya. Melalui implementasi *blue economy*, menjadi salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong kegiatan produktivitas pada perikanan budidaya, dan menekan angka produksi perikanan tangkap. Mengapa demikian? Upaya tersebut sangat penting diimplementasikan untuk melestarikan lingkungan sumber daya alam dan kehidupan ekosistem yang ada di laut. Menjaga sumber daya alam dan ekosistem di laut itu lah yang kemudian menjadi salah satu unsur yang sama pada konsep *Blue Economy* dan tujuan ekonomi Islam. Dalil Al-Quran dalam Surat Ibrahim ayat 32 dan Surat Az-Zukhruf ayat 32 (Gulzar, Islam, Khan, & Haq, 2021), bahwasannya Allah SWT telah menundukkan sumber daya alam salah satunya laut untuk dikelola oleh manusia, dengan manusia juga harus bertanggung jawab dalam menjaga alam (laut) tersebut agar tidak dieksploitasi secara berlebihan (*overfishing*).

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa implementasi pada konsep *Blue Economy* sebenarnya telah secara jelas tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an. Akan tetapi, belum banyak studi yang kemudian secara eksplisit membahas tentang pengaruh hasil produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tinjauan sumber daya alam dan lingkungan perspektif ekonomi Islam. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang pemanfaatan hasil produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mencapai SDGs (Cai, Huang, & Leung, 2019a; Seymour & Busch, 2017) dan *Blue Economy* (Alharthi & Hanif, 2020; ALshubiri, 2018; Bhattacharya & Dash, 2020; Hafidh, 2021; Plan Bleu, 2020; Qi, 2022; Wenhai et al., 2019). Sedangkan, baik konsep SDGs dan *Blue Economy* sebelumnya telah dijelaskan secara mendetail dalam *fiqih bi'ah* yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada kitab suci Al-Qur'an dan melalui penyampaian hadits Rasulullah SAW, tentang pemanfaatan, penjagaan dan pemeliharaan alam dan lingkungan. Dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta signifikansinya terhadap tanggung jawab manusia dalam mengelola dan memelihara alam laut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Hal tersebut kemudian menjadi motivasi penulis dalam mengembangkan kajian tentang *Pengaruh Hasil Produksi Pangan Laut terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Perspektif Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekonomi Islam*. Selain itu, besarnya potensi hasil laut dan perikanan di Indonesia juga menjadi motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh hasil produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi berkelanjutan dengan mengimplementasikan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mencapai *falah*, berupa kesejahteraan manusia baik di dunia dan akhirat, melalui pemanfaatan potensi laut Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat yang menjadi pokok permasalahan dalam yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Apakah produksi perikanan tangkap berpengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Apakah produksi perikanan tangkap berpengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

3. Apakah produksi perikanan budidaya berpengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. Apakah produksi perikanan budidaya berpengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
5. Apakah perdagangan internasional pada komoditas perikanan berpengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
6. Apakah perdagangan internasional pada komoditas perikanan berpengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat yang menjadi pokok permasalahan dalam yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang produksi perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek produksi perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang produksi perikanan budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek produksi perikanan budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh jangka panjang perdagangan internasional pada komoditas perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek perdagangan internasional pada komoditas perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis.

1. Manfaat bagi pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya peran industri perikanan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan sektor perikanan. Implementasi teknologi penangkapan ikan dan pengolahan ikan yang moderen, Indonesia dapat memanfaatkan peluang besar yang ada di sektor perikanan. Peningkatan teknologi penangkapan ikan dapat dicapai

melalui fasilitas yang lebih baik dan dukungan keuangan yang lebih besar bagi para nelayan Indonesia untuk meningkatkan industri perikanan.

2. Manfaat bagi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan tentang peran industri perikanan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, saran yang diberikan diharapkan dapat memberikan masukan kepada nelayan serta pemilik industri perikanan di Indonesia terkait penangkapan yang aman agar tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup biota laut.

3. Manfaat bagi akademisi dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kajian teoritis ilmu Ekonomi Islam khususnya tentang ketahanan pangan melalui hasil produksi pangan laut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dikaji secara mendetail di masa yang akan datang.